

Analisis Keterkaitan Sub Sektor Perikanan Dengan Sektor Lain Pada Perekonomian Di Provinsi Aceh

Nurlina

Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

email: nurlina@unsam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan sub sektor perikanan dengan sektor lain pada perekonomian di Provinsi Aceh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data yang dianalisis adalah Tabel Input Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai keterkaitan sektor ke belakang lebih besar daripada ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan lebih memanfaatkan sektor yang lain sebagai input dalam proses produksi untuk sektor perikanan dibandingkan penyediaan input untuk sektor yang lain. Keterkaitan ke depan sektor perikanan sebesar 0,0168 akan dilokasikan pada 9 sektor pada perekonomian Provinsi Aceh termasuk sektor perikanan sebesar 1,68%. Nilai keterkaitan ke belakang sektor perikanan sebesar 0,0294, hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan akan membutuhkan input tambahan untuk proses produksi antara lain dari sektor perikanan sendiri sebesar 0,0294 satuan (2,94%). Pada keterkaitan ke depan, sektor pertambangan minyak dan gas adalah sektor paling terkait dengan sektor perikanan dengan nilai keterkaitan sebesar 7,73. Pada keterkaitan ke belakang, sektor pertambangan minyak dan gas adalah sektor yang memiliki kaitan paling tinggi dengan sektor perikanan yaitu sebesar 7,73.

Kata kunci: Sub Sektor Perikanan, Keterkaitan, Input-output

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu sektor yang dapat menunjang pembangunan perekonomian adalah sub sektor perikanan. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat terjadi krisis ekonomi, peranan sektor perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini belum mendapatkan perhatian

khusus dari pemerintah dan kalangan pengusaha, padahal jika sektor ini dikelola dengan serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan ekonomi nasional serta dapat menekan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan tangkap.

Sub sektor perikanan air laut di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini mengingat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 Km garis pantai, di mana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut. Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta Km², Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati dan non hayati yang melimpah.

Pembangunan sektor perikanan merupakan bagian dari pembangunan

ekonomi yang dilaksanakan selama ini mengalami pasang surut, pada suatu saat sektor perikanan dijadikan sebagai unggulan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah, akan tetapi pada saat yang lain kurang diperhatikan. Salah satu respon yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat adalah adanya perubahan kebijakan otonomi yang lebih luas kepada daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang diharapkan akan mempengaruhi target-target pembangunan nasional, antara lain pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, yang akan dipengaruhi oleh investasi.

Pengembangan sektor perikanan perlu diarahkan untuk meningkatkan peran dalam menciptakan keterkaitan dengan sektor yang lain melalui peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan, serta keterkaitan yang kuat dengan sektor yang lain baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan perekonomian, dalam kasus ini Provinsi Aceh.

Sub sektor perikanan dalam perekonomian Provinsi Aceh memberikan kontribusi yang relatif besar. Hal ini juga didukung dengan adanya Pelabuhan Perikanan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan fisik dengan berbagai aspek perluasannya. Pelabuhan Perikanan berpotensi menjadi salah satu simbol distribusi hasil perikanan tangkap dari sumber daya yang dimiliki Provinsi Aceh, peluang secara ekonomis dapat menguntungkan para nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan. Adapun output sub sektor perikanan pada perekonomian Aceh pada tahun 2012 berdasarkan klasifikasi 66 sektor, lima sektor terbesar menurut peringkat outputnya adalah sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor angkutan darat, sektor jasa pemerintahan, dan sektor pertambangan minyak dan gas. Sedangkan sektor perikanan laut berada di peringkat kesepuluh dengan nilai output

sebesar 4,43 triliun rupiah atau memberikan andil sebesar 13,55 persen dari seluruh output yang diciptakan di Provinsi Aceh selama tahun 2012.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterkaitan sub sektor perikanan dengan sektor lain pada perekonomian di Provinsi Aceh.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Konsep Potensi Ekonomi

Potensi ialah segala sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin di mana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita (Baskoro, 2010:56). Potensi tersebut bisa berupa segala sumber daya alam yang terdapat di muka bumi ini, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tersebut sangat beranekaragam jenisnya. Karena keanekaragamannya tersebut, maka sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) dan sumber daya alam yang tidak dapat pulih (*non renewable resources*) (Suminto, 2004:98). Setiap sumberdaya alam tersebut masing-masing memiliki potensi untuk dikembangkan. Sumberdaya alam yang dikelola secara cermat dapat menjadi suatu keterkaitan yang menyatu dalam melaksanakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk menaikkan atau mempertahankan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita dengan tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk. Pandangan tersebut merupakan suatu pandangan yang dipergunakan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Pada tingkat nasional pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) dan pada tingkat daerah yakni Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto dapat diartikan sebagai nilai-nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara

tersebut dalam satu tahun tertentu (Mankiw, 2007:132).

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibanding dengan masa sebelumnya. Hal ini juga dibarengi dengan kenaikan tingkat pendapatan penduduk yang berimbas pada tingkat kesejahteraannya yang semakin membaik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu tingginya tingkat pendapatan masyarakat ternyata tidak menjamin bahwa kehidupan masyarakat secara keseluruhan mengalami perbaikan kualitas hidup. Justru hal ini akan memicu terjadinya disparitas akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Ketimpangan/disparitas telah menjadi pemasalahan turun temurun yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selain distribusi pendapatan yang tidak merata, ketimpangan juga dipicu oleh konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah, perbedaan sumber daya alam (SDA), perbedaan kondisi geografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi. Kemakmuran suatu wilayah memang berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya. Untuk bisa mengubah suatu wilayah pada kondisi yang lebih makmur, akan tergantung pada usaha-usaha daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan dengan cara menggali potensi yang ada di daerah tersebut. Hal ini sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh daerah tersebut, terutama dalam memprioritaskan sektor-sektor mana saja yang bisa dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu (Sukirno, 2006:85). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2006:93), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

Potensi Sub Sektor Perikanan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Ada kurang lebih 17.500 pulau yang terdapat di Indonesia. Negara Indonesia dikenal juga dengan sebutan sebagai negara maritim, dimana dua per tiga wilayahnya merupakan lautan, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang luasnya 3,1 juta km² (Suparta, 2010:17).

Indonesia sebagai negara maritim dan merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut dan garis pantai yang sangat luas. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya perairan yang terdapat di wilayah kekuasaannya tersebut. Selama ini, salah satu sumber daya perairan yang membuat nama Indonesia dikenal oleh dunia yaitu sumber daya perikananannya yang sangat melimpah.

Potensi ekonomi sumber daya pada sektor perikanan diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US\$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US\$ 46,7 miliar per tahun, potensi

perairan umum sebesar US\$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US\$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US\$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun. Selain itu, potensi lainnya pun dapat dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata Menurut Badan Riset Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki lima keunggulan komparatif dibandingkan negara lain di dunia yaitu (Kohar, 2008:23):

1. *Marine Mega Biodiversity*: wilayah perairan Indonesia memiliki keragaman hayati yang tidak ternilai baik dari segi komersial maupun saintifiknya yang harus dikelola dengan bijaksana.
2. *Plate Tectonic* : Indonesia merupakan tempat pertemuan tiga lempeng tektonik, sehingga wilayah tersebut kaya akan kandungan sumberdaya alam dasar laut, namun juga merupakan wilayah yang relatif rawan terhadap terjadinya bencana alam.
3. *Dynamic Oceanographic and Climate Variability* : perairan Indonesia merupakan tempat melintasnya aliran arus lintas antara samudera Pasifik dan samudera Indonesia, sehingga merupakan wilayah yang memegang peranan penting dalam sistem arus global yang menentukan variabilitas iklim nasional, regional dan global dan berpengaruh terhadap distribusi dan kelimpahan sumberdaya hayati.
4. Indonesia dengan konsep Wawasan Nusantara sebagaimana diakui dunia internasional sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS 82), memberikan konsekuensi kepada negara dan rakyat Indonesia untuk mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal dengan tetap memperhatikan hak-hak tradisional dan internasional.
5. Indonesia sebagai negara kepulauan telah menetapkan alur perlintasan pelayaran internasional, yaitu yang dikenal dengan Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI), hal ini mengharuskan kita untuk mengembangkan kemampuan teknik

pemantauannya serta kemampuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya.

Secara garis besar, sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. Sehingga usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dan mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan (Baskoro, 2010:83). Berdasarkan Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun. Sedangkan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Menurut Daryanto (2007:33) sumber daya perikanan laut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu: (1) sumber daya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan; (2) sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis sumber daya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan; (3) sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan *oceanic* seperti tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain; (4) sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut. Sedangkan potensi pengembangan pada perikanan budidaya dapat dilakukan pada (1) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, moluska dan rumput laut; (2) budidaya air payau; (3) air tawar yang terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa), kolam air tawar dan mina padi sawah (Fauzi, 2006:94).

Pembangunan Sub Sektor Perikanan

Sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu sektor perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi Indonesia. Namun secara empiris

pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta *stakeholders* lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010).

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, merupakan suatu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan revitalisasi diharapkan sektor perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan (petani ikan), menyumbang terhadap ekspor nonmigas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional. Sehingga lebih dapat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian Indonesia.

Menurut Kohar (2008:41) Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Namun, lebih dari itu, karena sektor kelautan dan perikanan merupakan basis perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya jika sektor perikanan dan kelautan ini dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. Dengan demikian, dukungan sektor industri terhadap pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menjadi suatu hal yang bersifat keharusan. Karena itu, pembangunan perikanan dan kelautan dan industri bukanlah alternatif yang dipilih, namun adalah komplementer dan saling mendukung baik bagi input maupun output.

Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang

selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Daryanto (2007:95), salah satu persoalan yang mendasar dalam perencanaan pengembangan sektor perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Hal ini menyebabkan kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan sektor perikanan. Selain itu, untuk menjadikan sektor perikanan sebagai motor penggerak sektor riil, dalam pengembangannya harus memperhatikan kaidah ekonomi dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), dan *pro-growth* (pertumbuhan). Dengan melihat potensi yang ada, pembangunan kelautan dan perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari pada keadaan sekarang. Adanya kesalahan orientasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya menyebabkan Indonesia belum dapat mengoptimalkan manfaat dari potensi sumber daya yang ada. (KKP, 2010).

Konsep Input Output

Model Input Output atau Tabel Input Output pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Wassily W. Leontif pada tahun 1930-an. Menurut BPS (2008) pengertian Tabel Input Output adalah suatu tabel yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor ekonomi serta saling keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu dengan bentuk penyajian berupa matriks (Nazara, 2005:21). Isian sepanjang baris Tabel Input Output menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, dan pada baris nilai tambah menunjukkan komposisi penciptaan nilai tambah sektoral. Sedangkan masing masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses produksi. Dengan kata lain,

penggunaan Tabel Input Output dapat menunjukkan bagaimana output dari suatu sektor ekonomi didistribusikan ke sektor-sektor lainnya dan bagaimana pula suatu sektor memperoleh input yang diperlukan dari sektor-sektor lainnya.

Analisis Input Output (Analisis I-O) menunjukkan bahwa dalam perekonomian secara keseluruhan mengandung keterkaitan dan ketergantungan sektoral, yang mana output suatu sektor merupakan input pada sektor lain dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang membawa mereka ke arah keseimbangan (*equilibrium*) antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian secara menyeluruh. Sebagai metode kuantitatif, Tabel Input Output memberikan gambaran secara menyeluruh tentang (Nazara, 2005:25):

1. Struktur perekonomian suatu wilayah yang mencakup output dan nilai tambah masing-masing sektor.
2. Struktur input antara yaitu transaksi penggunaan barang dan jasa antar sektorsektor produksi.
3. Struktur penyediaan barang dan jasa, baik berupa produksi dalam negeri maupun barang impor atau yang berasal dari luar negeri.
4. Struktur permintaan barang dan jasa, baik berupa permintaan oleh berbagai

Sektor produksi maupun permintaan untuk konsumsi, investasi dan ekspor. Kegunaan dari Tabel Input Output menurut BPS (2008), antara lain (Nazara, 2005:26):

1. Memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor produksi.
2. Menyusun proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.
3. Melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa terutama dalam analisis terhadap kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya.
4. Mengetahui sektor-sektor yang pengaruhnya paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor

yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

5. Melihat konsistensi dan kelemahan berbagai data statistik yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai landasan perbaikan. Penyempurnaan, dan pengembangan lebih lanjut.
6. Menganalisis perubahan harga, yaitu melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari perubahan harga input terhadap output.

Keunggulan dan Kelemahan Input Output

Analisis I-O merupakan varian terbaik keseimbangan umum (*general equilibrium*) yang memiliki tiga unsur utama. Unsur-unsur tersebut antara lain (1) memusatkan perhatiannya pada perekonomian dalam keadaan ekuilibrium, (2) tidak berpusat pada analisis permintaan tetapi pada masalah teknis produksi, (3) analisis ini didasari pada penelitian empiris. Keunggulan dari Tabel Input Output Indonesia 2005 adalah (Nazara, 2005:26):

1. Kemampuannya untuk melihat sektor demi sektor dalam perekonomian secara rinci sehingga membuat analisis I-O cocok bagi proses perencanaan.
2. Kemampuannya untuk menganalisis keterkaitan dan hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian. Sedangkan keterbatasan Tabel Input Output Koefisien input atau koefisien teknis diasumsikan tetap konstan selama periode analisis atau proyeksi. Teknologi dalam proses yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi pun dianggap konstan karena koefisien teknis dianggap konstan. Akibatnya perubahan kuantitas dan harga input akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas harga output.
3. Besarnya biaya yang harus dilakukan dalam penyusunan Tabel Input Output dengan menggunakan metode survey.
4. Semakin banyak agregasi yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang ada akan menyebabkan semakin besar pula kecenderungan pelanggaran terhadap asumsi homogenitas dan akan semakin banyak informasi ekonomi yang

terperinci tidak tertangkap dalam analisisnya.

Hipotesis

Adapun dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu: “terdapat keterkaitan yang signifikan sub sektor perikanan dengan sektor lain pada perekonomian di Provinsi Aceh”.

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan oleh peneliti sesuai dengan kepentingan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Provinsi Aceh berkaitan dengan sub sektor perikanan serta perekonomian Provinsi Aceh.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan jurnal yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
2. Studi dokumenter (*documentary*), yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada maupun dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan seperti data mengenai sektor perikanan dan perekonomian Provinsi Aceh yang dilihat dari PDRB.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data yang dianalisis adalah Tabel Input Output.

1. Tabel Input-Output

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model input output yang dibantu dengan menggunakan SPSS Versi 20. Tabel Input-Output merupakan matrik yang memotret kegiatan ekonomi suatu daerah atau negara atau wilayah pada waktu tertentu suatu aktivitas ekonomi yang mencatat transaksi input output yang berkaitan antar sektor

(ke depan atau ke belakang). Tabel IO dibagi empat kuadran : (1) *Intermediate quadrant* (Kuadran I/*processing quadrant*) yang merupakan kuadran permintaan antara arus barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi perekonomian, (2) *Final demand* (kuadran II atau komponen pengeluaran wilayah = *Gross Domestic Regional Product*) yang menggambarkan transaksi permintaan akhir yang berasal baik dari output sektor produksi maupun impor yang dirinci dalam berbagai jenis penggunaan, (3) *Primary input quadrant* (kuadran III) yang menunjukkan penggunaan input primer atau nilai tambah, jumlah keseluruhan ini menghasilkan *product domestic regional bruto*, dan (4) *Primary input-final demand quadrant* (kuadran IV) yang menunjukkan transaksi langsung antara input primer dengan permintaan akhir tanpa ada mekanisme transmisi dari sistem produksi dan umumnya jarang terdapat dalam Tabel IO.

2. Analisis Keterkaitan

Konsep kaitan mengukur tingkat ketergantungan antar sektor dalam ekonomi dan sejauhmana sektor dipengaruhi oleh sektor lainnya, terdiri dari:

a. Analisis Keterkaitan ke Depan

Keterkaitan langsung ke depan, menunjukkan hubungan keterkaitan pengaruh yang ditimbulkan oleh satu unit permintaan akhir suatu sektor terhadap total penjualan output semua sektor di dalam suatu perekonomian. Sektor tersebut punya keterkaitan ke depan yang besar jika nilainya lebih besar dari satu, dirumuskan (Nazara, 2005:21):

$$FL_i = \sum_{j=1}^n$$

Dimana:

FL_i = keterkaitan langsung ke depan sektor ke-i

a_{ij} = unsur matriks koefisien teknis atau koefisien langsung

b. Analisis Keterkaitan ke Belakang

Keterkaitan kebelakang langsung, menunjukkan hubungan keterkaitan pengaruh yang ditimbulkan oleh satu unit permintaan akhir pada sektor tersebut terhadap total pembelian input semua sektor di dalam suatu perekonomian. Sektor tersebut punya keterkaitan kebelakang yang besar jika nilainya lebih besar dari satu, dirumuskan (Nazara, 2005:22):

$$BL_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Dimana:

BL_j = Keterkaitan langsung kebelakang sektor ke-j,

a_{ij} = Unsur matriks koefisien teknis atau koefisien langsung.

3. Analisis *Multiplier Product Matrix* (MPM)

Nilai MPM pada prinsipnya merupakan suatu teknik penyajian peringkat sektor-sektor yang berdasarkan nilai forward linkage dan backward linkage dimana dalam hasil keduanya dinormalisir dengan rata-rata elemen matrik kebalikan Leontief.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterkaitan ke Depan dan ke Belakang Sektor Perikanan

Berdasarkan hasil olahan data dapat dijelaskan bahwa keterkaitan langsung ke depan dan kebelakang dari berbagai sektor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang relatif tinggi terhadap perekonomian Aceh adalah sub sektor perikanan. Dari keterkaitan langsung ke depan sektor perikanan menunjukkan keterkaitan yang kuat dalam menggunakan sebagian output dari sektor-sektor perdagangan, konstruksi, angkutan darat, pertambangan minyak dan gas, padi, industri pengilangan minyak dan gas, industri penggilingan, beras, biji-bijian & tepung, dan jasa sosial dan kemasyarakatan.

Jika dilihat dari keterkaitan ke belakang sub sektor perikanan memiliki nilai keterkaitan yang kuat terhadap penyediaan input bagi bagi sektor-sektor ekonomi

lainnya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari sektor perdagangan, konstruksi, angkutan darat, pertambangan minyak dan gas, padi, industri pengilangan minyak dan gas, industri penggilingan, beras, biji-bijian & tepung, dan jasa sosial dan kemasyarakatan sebagai penyedia input pada sub sektor perikanan. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pada setiap satu satuan nilai output sub sektor perikanan akan dialokasikan kepada sektor-sektor lainnya atau pada sub sektor perikanan itu sendiri sebesar 0,0004 satuan atau setiap peningkatan dalam permintaan akhir sebesar Rp 0,04.

Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada keterkaitan ke depan, sektor pertambangan minyak & gas adalah sektor paling terkait dengan sektor perikanan dengan nilai keterkaitan sebesar 0,00397425. Sedangkan keterkaitan ke depan paling rendah yaitu pada sektor angkutan darat dimana diperoleh nilai keterkaitan sebesar 0,000729087. Pada sektor jasa pemerintahan dan pertanahan tidak memiliki keterkaitan ke depan dengan sektor perikanan.

Pada keterkaitan ke belakang, sektor pertambangan minyak & gas adalah sektor yang memiliki kaitan paling tinggi dengan sektor perikanan yaitu sebesar 0,00397425, sedangkan sektor angkutan darat merupakan sektor yang memiliki keterkaitan terendah ke belakang dengan sektor perikanan, dimana nilai keterkaitannya adalah 0,000536449.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kohar (2008), yang menunjukkan bahwa keterkaitan sektor perikanan ke belakang yang lebih besar daripada ke depan, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut lebih mampu menarik sektor hulu, dibandingkan dengan sektor hilir atau lebih berorientasi memanfaatkan input dari sektor yang lain dari pada menyediakannya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan sektor yang lain, nilai keterkaitan sektor perikanan baik kedepan maupun ke belakang masih rendah, sehingga akan lebih banyak dipengaruhi sektor lain, untuk menyediakan input maupun penggunaan output.

Keterkaitan Sektor Perikanan pada Perekonomian Provinsi Aceh

Nilai keterkaitan langsung sektor perikanan baik ke depan maupun ke belakang masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor yang lain. Dari nilai keterkaitan sektor perikanan memiliki keterkaitan ke belakang lebih besar dari ke depan, hal ini menunjukkan bahwa orientasi pengembangan sektor perikanan lebih menyediakan input, dibandingkan output. Maka, hasil output dari kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi lebih banyak digunakan sebagai input bagi sektor yang lain.

Sektor perikanan mempunyai nilai koefisien keterkaitan ke depan 0,0168 maka setiap satu satuan nilai output sektor perikanan akan dialokasikan kepada sektor-sektor lainnya maupun pada sektor perikanan itu sendiri sebesar 0,0168 satuan. Sedangkan nilai keterkaitan tidak langsung ke belakang sektor perikanan sebesar 0,0294, maka jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu satuan pada sektor perikanan, maka sektor ini akan membutuhkan input tambahan untuk proses produksi dari sektor lainnya secara pada perekonomian Provinsi Aceh, termasuk sektor perikanan sendiri sebesar 0,0294 satuan secara tidak langsung.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan ke depan dan ke belakang antara sektor perikanan dengan sektor-sektor lainnya di Provinsi Aceh memiliki keterkaitan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Aceh. Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu keterkaitan sektor lainnya baik ke depan maupun ke belakang.

5. PENUTUP

Dari analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Nilai keterkaitan sektor ke belakang lebih besar daripada ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan lebih memanfaatkan sektor yang lain sebagai input dalam proses produksi untuk sektor perikanan dibandingkan penyediaan input untuk sektor yang lain.

2. Keterkaitan ke depan sektor perikanan sebesar 0,0168 akan dilokasikan pada 9 sektor pada perekonomian Provinsi Aceh termasuk sektor perikanan sebesar 1,68%.
3. Nilai keterkaitan ke belakang sektor perikanan sebesar 0,0294, hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan akan membutuhkan input tambahan untuk proses produksi antara lain dari sektor perikanan sendiri sebesar 0,0294 satuan (2,94%).
4. Pada keterkaitan ke depan, sektor pertambangan minyak dan gas adalah sektor paling terkait dengan sektor perikanan dengan nilai keterkaitan sebesar 7,73. Pada keterkaitan ke belakang, sektor pertambangan minyak dan gas adalah sektor yang memiliki kaitan paling tinggi dengan sektor perikanan yaitu sebesar 7,73.

6. REFERENSI

- Baskoro. 2010. Dampak Investasi Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Jawa Tengah. **Jurnal Perikanan dan Kelautan. Vol 1. Hal 1-15.**
- Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2008.
- Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2012.
- Daryanto, Arief. 2007. **Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Perikanan.** Yogyakarta: BPFE.
- Fauzi, Muhammad. 2006. **Teori Ekonomi Sumberdaya Perikanan.** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010.
- Kohar, Abdul. 2008. Analisis Keterkaitan Sektor Perikanan dengan Sektor Lain pada Perekonomian Jawa Tengah. **Jurnal Saintek Perikanan. Vol 4. Hal 1-8.**
- Mankiw, N. Gregory. 2007. **Pengantar Ekonomi Makro.** Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazara. 2005. **Analisis Input-Output.** Jakarta: LPFE UI.
- Reksohadiprojo dan Pradono. 1988. **Sumber Daya Perikanan.** Yogyakarta: Andi.

- Sukirno, Sadono. 2006. **Makro Ekonomi Teori Pengantar**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suminto. 2004. **Teori Ekonomi Makro**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparmoko, M. 2006. **Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Yogyakarta: Andi.
- Suparta, Nyoman. 2010. **Menetapkan Strategi Pengelolaan Pertanian**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.